

Siaran Pers:

Ketergantungan Pada Beras Ancam Ketahanan Pangan

Jakarta, 16 September 2025: Lonjakan harga beras yang terus berlanjut sejak 2022 hingga 2025 menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan nasional. Bergantung pada satu komoditas membuat Indonesia semakin rentan, padahal berbagai daerah memiliki sumber pangan lokal yang beragam dan potensial untuk dikembangkan.

Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom CELIOS, perspektif ketahanan pangan Indonesia sejak lama terlalu sempit karena selalu dikaitkan dengan cadangan beras. Pemerintah menjadikan beras sebagai indikator ketahanan pangan dengan klaim surplus stok. Tapi kenyataannya, harga di pasar tradisional tetap tinggi. Rata-rata sudah di atas Rp15.000/kg dari sebelumnya di bawah Rp12.500.

"Harga beras makin naik, berbanding terbalik dengan klaim surplus. Bahkan kebijakan *food estate* pun tidak menjawab masalah. Ambil contoh di Merauke, Papua, harga beras tetap naik," jelas Bhima dalam diskusi media jelang COP30 pada Selasa 16 September 2025 di Jakarta.

Di sisi lain, angka impor bahan pangan, produk peternakan, dan pupuk terus meningkat sejak 2012 sampai 2024. Bahan pangan yang diimpor antara lain produk pangan, hewan ternak, produk susu, telur dan turunannya. Impor lain juga mencakup pupuk kimia jadi.

"Jadi ini aneh, Indonesia terus mengimpor pupuk yang tujuannya untuk meningkatkan produksi beras, tapi di sisi lain impor pangan kita juga meningkat. Artinya, kebijakan impor pupuk yang terus meningkat itu, tidak berujung pada peningkatan produksi pangan," tutur Bhima.

Bhima menunjukkan bahwa luas panen padi sejak 2021 pun berkurang. Luas panen padi di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi merosot dengan cepat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat peringatan tersebut. Pada 2021–2023, luas panen padi justru menurun, sementara permintaan terus meningkat. "Tren ini diperparah ketidakpastian iklim pascapandemi," kata Bhima.

Menurut Ayip Said Abdullah, Indonesia menghadapi anomali besar. Indonesia adalah salah satu negara produsen beras terbesar, tapi juga importir terbesar. "Jadi produsen tapi malah impor, duitnya jelas tidak kembali ke masyarakat," kata Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRPP) itu.

Kondisi ini semakin ironis jika melihat Global Hunger Index (GHI). Tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan kelaparan tertinggi di Asia Tenggara dengan skor 17,9. Pada 2023, posisi Indonesia justru naik menjadi urutan kedua dengan skor 17,6. Indikator kelaparan ini mencakup ketidakcukupan pangan, prevalensi stunting, dan kemiskinan. "Di pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia, kelaparan lebih tinggi dibanding perkotaan," tambah Ayip.

Ayip menambahkan, petani padi yang dominan berada di utara Pulau Jawa kini menghadapi agroekosistem yang rusak, lahan sawat menciut dan tata kelola yang buruk. “Petani hanya dijadikan alat produksi, tak berhenti dipasok pupuk dan lainnya, tanpa dipikirkan kesejahterannya sebagai tulang punggung pangan nasional,” katanya.

Petani Gurem Timbul dari Konflik Lahan

Benny Wijaya, Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengingatkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2019–2024) terjadi penurunan luas baku sawah hingga 79 ribu hektare. Konversi lahan serta konflik agraria terus meningkat akibat pembangunan infrastruktur, perumahan, hingga ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan.

Kondisi ini makin memperburuk nasib petani. Menurut BPS, sebanyak 62% petani Indonesia berstatus gurem dengan lahan di bawah setengah hektare. Angka ini naik dalam satu dekade terakhir, dari 14,62 juta rumah tangga tani gurem pada 2013 menjadi 17,24 juta pada 2023.

Ketergantungan berlebihan pada beras terbukti menciptakan kerentanan. Pangan lokal, laut, dan hutan seharusnya menjadi tumpuan baru. Pemerintah perlu mendorong kedaulatan pangan berbasis potensi lokal, bukan sekadar mengejar surplus beras di atas kertas.

“Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud jika tanah kembali ke tangan petani, pangan lokal diberi tempat, dan kebijakan tidak lagi terpusat pada beras,” tutup Benny.

Potensi Pangan Lokal yang Terabaikan

Padahal, Indonesia menyimpan kekayaan pangan alternatif. Di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua terdapat pangan lokal yang bisa menjadi substitusi beras. Sayangnya, karena kebijakan pangan terpusat, beras tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar.

“Sebanyak 23.472 desa punya potensi tinggi untuk menjadi basis produksi pangan restoratif, yaitu pangan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat tanpa merusak alam. Beberapa jenis pangan justru membutuhkan tanaman besar sebagai kanopi, sehingga hutan tidak perlu dibuka,” ungkap Bhima.

Alternatif lain, Indonesia memiliki 14,88% desa yang berbatasan dengan laut dan 24,11% desa berbatasan dengan kawasan hutan. Sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk ikan, tanaman pangan, maupun obat-obatan.

“Jangan hanya karena resentralisasi kebijakan pangan di pusat, akhirnya salah arah dan berujung inflasi, kemiskinan, hingga ancaman ketahanan pangan,” tegas Bhima.

Narahubung: Viky (+62 813-2701-4454)